

**KINERJA DINAS SOSIAL DALAM MENURUNKAN ANGKA PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) BAGI LANJUT USIA TERLANTAR  
DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

Bella Arliyanti

NPP. 30.0294

*Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: bellaarliyantixo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Lina Marlina, S.Pd., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Researchers focused on problems in reducing the number of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) for Neglected Elderly in Jambi City.

**Purpose:** Knowing the Performance of the Social Service in reducing the Number of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) for Neglected Elderly in Jambi City, Jambi Province. In addition to knowing what are the supporting and inhibiting factors as well as the efforts made in overcoming obstacles in reducing the Number of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) for Neglected Elderly in Jambi City, Jambi Province. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. **Result:** The findings obtained by researchers in this study indicate that the performance of the Social Service in reducing the Number of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) for Neglected Elderly in Jambi City, Jambi Province is quite good, but there are still several supporting indicators for services and treatment that have not been fulfilled. In terms of human resources, the Jambi City Social Service has yet to attend training for the handling of neglected elderly, employees whose placement of employees does not match the qualifications. In socialization, there has been no socialization carried out by the Social Service regarding the handling of neglected elderly people. **Conclusion:** The performance of the Social Service in reducing the Number of People with Social Welfare Problems (PMKS) for Neglected Elderly in Jambi City, Jambi Province is quite good but still has deficiencies in terms of social welfare.

**Keywords:** Social Welfare, Performance, People with Social Welfare Problems

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus pada permasalahan dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi. **Tujuan:** Mengetahui Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi. Selain itu untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi cukup baik namun masih terdapat beberapa indikator penunjang pelayanan dan penanganan yang belum terpenuhi. Pada sumber daya manusia bahwa Dinas Sosial Kota Jambi masih belum ada mengikuti diklat untuk penanganan Lanjut Usia Terlantar, pegawai yang penempatan pegawai belum sesuai dengan kualifikasi. Pada Sosialisasi, belum ada sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial terkait penanganan Lanjut Usia Terlantar. **Kesimpulan:** Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi cukup baik tetapi masih memiliki kekurangan dilihat dari sisi kesejahteraan sosial belum berjalan dengan baik dilihat dari beberapa indikator yang belum memenuhi sehingga tidak bisa dijadikan acuan dalam mencapai kesejahteraan sosial. **Kata Kunci :** Kesejahteraan Sosial, Kinerja, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satunya mengenai kesejahteraan sosial di masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, kelompok maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan gagasan dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada. Permasalahan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan, seiring dengan derasnya arus globalisasi yang melanda dunia salah satunya Indonesia. Padahal, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial terus meningkat dan sebanding dengan kebutuhan haknya selaku Warga Negara. Maka dari itu, berbagai dampak positif dan negatif dari persoalan sosial bermunculan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang

karena suatu gangguan, hambatan, atau kesulitan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, serta sosial secara akseptabel.

Penelantaran pada lanjut usia banyak terjadi karena berbagai faktor seperti tidak adanya keluarga yang mengurus, keterbatasan kesanggupan keluarga dalam mengurusnya, dan tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya sehingga lanjut usia tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Hal itu tergabung dengan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan serta meningkatnya tuntutan kegiatan untuk lanjut usia potensial sehingga lanjut usia tidak mendapat perhatian dan kepedulian dari orang terdekat seperti keluarga yang mengakibatkan ketelantaran lanjut usia terlantar. Dinas Sosial Kota Jambi adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menangani masalah kesejahteraan sosial salah satunya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu kinerja Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial terdapat level, individu, keluarga atau masyarakat. Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka PMKS bagi lanjut usia terlantar ini diperlukan agar menjadikan lanjut usia terlantar bugar, bermanfaat dan independen dapat didahului dari pola hidup sehat dan menyiapkan kehidupan lanjut usia terlantar unggul. Permasalahan yang timbul mengenai kesejahteraan sosial dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar ini sesuai dengan konteks Fungsi Pelayanan Sosial yaitu belum optimalnya kebijakan dalam penanganan. Hal ini dikarenakan aturan mengenai PMKS bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi belum terlaksana dengan baik didasarkan oleh masih banyaknya angka bagi Lanjut Usia Terlantar. Kemudian, belum optimalnya sinkronisasi dalam penanganan PMKS bagi Lanjut Usia Terlantar. Hal ini juga dikarenakan data Lanjut Usia Terlantar yang dilapangan berbeda dengan data Lanjut Usia Terlantar di Dinas Sosial Kota Jambi serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kota Jambi dalam menurunkan angka PMKS bagi Lanjut Usia Terlantar tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Kinerja Dinas Sosial Dalam Menurunkan Angka Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Usia Lanjut Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi**”.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi cukup baik tetapi masih memiliki kekurangan dilihat dari masih banyak Lanjut Usia Terlantar belum terdata ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga Lanjut Usia Terlantar tidak mempunyai dokumen kependudukan maka tidak bisa mendapatkan bantuan yang layak, penempatan pegawai khusus bidang sosial belum sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat memenuhi standar agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan optimal, kuota panti sosial terbatas sehingga Lanjut Usia Terlantar tidak dapat tinggal di Panti Sosial dan masih terlantar, serta Kurangnya kesadaran keluarga untuk mengurus Lanjut Usia Terlantar yang kurang peduli akan adanya Lanjut Usia Terlantar di lingkungan kecil seperti keluarga sehingga mengakibatkan sulitnya pemerintah mengetahui keberadaan mereka dalam pemberian bantuan kepada mereka.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani, Mu'min Ma'ruf, Gusti Ayu Ambarawati pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul “Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sukabumi Provinsi Jawa Barat”. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan garis kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar Rp.26.777 di

tahun 2015 dari Rp.395.131 per kapita per bulan menjadi Rp.421.908 per kapita per bulan dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado)”. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengambil kebijakan yang tujuannya adalah untuk menanggulangi masalah anak terlantar di Kota Manado beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan angka bahkan membawa Kota Manado ke angka 0 untuk kasus Anak Terlantar.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rika Nuriana pada tahun 2017 yang berjudul “Pemberdayaan “PMKS” (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya”. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan Tahapan-tahapan pemberdayaan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya baru dilakukan pada tahap penyadaran dan tahap pengkapisitasan saja, karena dalam tahap pemberdayaan lansia belum dikatakan berdaya sepenuhnya. Pemberdayaan lansia masih rendah, karena lansia tidak memiliki potensi, tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan, tidak dapat memahami cara membuat keterampilan secara mandiri, tidak dapat menciptakan kreativitas ekonomi, dan tidak ada yang memberikan argumen.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti membahas tentang kinerja Dinas Sosial. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus selain itu pengukuran atau indikator berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti menggunakan Kinerja menurut Agus Dwiyanto (2008:50) dan Teori Kesejahteraan Sosial menurut segal dan Brzuzy dalam Suud (2006) karena teori ini dirasa mampu mendukung pelaksanaan penelitian karena mencakup semua aspek yang diperlukan di Lapangan. Penelitian yang lebih berfokus Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi.

#### **1.5. Tujuan.**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi
4. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif karena peneliti ingin mengetahui secara jelas serta mendeskripsikan dan menggambarkan tentang bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan teknik Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017:226) dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Kinerja Dinas Sosial dalam Menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi**

Untuk mengetahui Kinerja ini peneliti menggunakan Teori Agus Dwiyanto (2008:50) dengan menggunakan 5 ukuran yaitu, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas dan Akuntabilitas.

#### **A. Produktivitas**

Pengukuran produktivitas menjadi salah satu peranan yang penting untuk mengetahui apakah sebuah produktivitas kerja sesuai dengan yang dituju. Dilihat dari segi produktivitas yang memuat indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia belum memenuhi dikarenakan masih ada pegawai yang penempatannya belum sesuai dengan kualifikasi dan belum terselenggaranya Pendidikan dan Latihan (Diklat). Sedangkan indikator sarana dan prasarana dapat dikatakan dalam kondisi baik. Selain itu, indikator program peningkatan kualitas petugas dapat dikatakan baik misalnya memberikan pertemuan rutin antara pekerja sosial dan penyuluh sosial dengan Lanjut Usia Terlantar serta indikator sosialisasi yang belum memenuhi dikarenakan belum ada sosialisasi yang diberikan Dinas Sosial terkait penanganan Lanjut Usia Terlantar.

#### **B. Kualitas Layanan**

Kualitas Layanan adalah salah satu aspek penting yang harus dilihat dalam pelayanan publik. Sasaran pembangunan Dinas Sosial adalah individu, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut PMKS. Dilihat dari segi Kualitas Layanan yang memuat indikator ketepatan waktu dapat dikatakan cukup baik tergantung dari kasus PMKS itu sendiri dan dilakukan secara bertahap apabila Lanjut Usia Terlantar sedang sakit dan ingin berobat. Sedangkan indikator kepastian biaya dapat disimpulkan baik karena proses pemanfaatan dan pembiayaan Lanjut Usia Terlantar bersumber dari APBN, APBD maupun dari CSR (*Corporate Social Responsibility* / tanggung jawab sosial perusahaan). Dalam indikator sikap petugas, mutu layanan yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial Kota Jambi sudah dikatakan baik artinya keinginan masyarakat dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. Selain itu, indikator kenyamanan tempat dapat disimpulkan kenyamanan tempat yang diberikan Dinas Sosial Kota Jambi sudah baik dan membuat nyaman masyarakat.

#### **C. Responsivitas**

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari segi responsivitas yang memuat indikator kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat yang didapat dalam

pelayanan dan penanganan Lanjut Usia Terlantar ini sudah baik dengan diberikannya bantuan di Luar Panti sehingga masyarakat dapat merasakan bantuan secara merata dan pengaduan yang telah dilaporkan dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik.

#### **D. Responsibilitas**

Responsibilitas adalah pengawasan yang bersifat internal dalam mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pimpinan. Pengawasan dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan agar apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dilhat dari segi responsibilitas yang memuat indikator pengawasan dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan penanganan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap Lanjut Usia Terlantar sudah berjalan dengan baik dan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang mendukung serta membantu pekerjaan tersebut.

#### **E. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pengawasan yang dilakukan secara eksternal dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Dapat dilihat dari segi akuntabilitas yang memuat indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat disimpulkan sudah sesuai dikarenakan juga standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan dan pedoman penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

### **3.2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar di Dinas Sosial Kota Jambi**

Untuk mengetahui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini peneliti menggunakan Teori Kesejahteraan Sosial menurut Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006) dengan menggunakan 4 ukuran yaitu, Kesehatan, Keadaan Ekonomi, Kebahagiaan, dan Kualitas Hidup.

#### **A. Kesehatan**

Kesehatan merupakan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit/ kelemahan/ disabilitas. Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dilihat dari segi kesehatan yang memuat indikator kondisi kesehatan dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan Lanjut Usia Terlantar mayoritas dalam keadaan cukup baik tetapi masih ada juga yang mengidap penyakit sehingga Dinas Kesehatan dan Puskesmas bekerja sama dalam melakukan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga yang dialam Lanjut Usia Terlantar ini yaitu mengalami penurunan kondisi fisik serta mengidap penyakit bawaan atau tidak.

#### **B. Keadaan Ekonomi**

Keadaan ekonomi merupakan suatu kedudukan yang menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh orang itu sendiri. Setiap orang mempunyai perbedaan ekonomi yang beragam. Tingkat ekonomi juga disebabkan karena tingkat kemampuan dan kerja keras orang yang berbeda-beda. Dilhat dar segi keadaan ekonomi yang memuat indikator tingkat pendapatan

dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan Lanjut Usia Terlantar ini tidak memiliki pendapatan dan hanya mengharap belas kashan dar warga setempat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

### **C. Kebahagiaan**

Kebahagiaan adalah pikiran atau perasaan senang, ketentrman hidup secara lahir dan batin yang maknanya adalah untuk meningkatkan diri. Karakteristik utama dari kebahagiaan itu sendiri adalah kepuasan terhadap hidup atau momen yang sedang dijalani. Dilihat dari segi kebahagiaan yang memuat indikator tingkat kebahagiaan dapat disimpulkan bahwa tingkat kebahagiaan Lanjut Usia Terlantar memprihatinkan dikarenakan tekanan dan menjadi beban dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi yang membuat mereka merasa tidak bahagia sehingga Lanjut Usia Terlantar ini harus merasakan beban di sisa-sisa akhir kehidupan mereka.

### **D. Kualitas Hidup**

Kualitas hidup rakyat dapat diartikan sebagai istilah pada emosional, sosial dan kesejahteraan fisik seseorang serta kemampuan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, kualitas hidup dapat dikategorikan atas; kualitas hidup buruk dengan skor 0-50 dan kualitas hidup baik 51-100. Dilihat dari segi kualitas hidup yang memuat indikator kesempatan kerja bahwa tidak semua Lanjut Usia Terlantar memiliki kesempatan kerja yang sama. Misalkan apakah Lanjut Usia Terlantar tersebut masih dalam kategori Lanjut Usia Potensial bukan lanjut Usia Tidak Potensial, sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari atau tidak. Sedangkan indikator pelatihan dapat disimpulkan bahwa pelatihan pelatihan yang diberikan kepada Lanjut Usia Terlantar diharapkan dapat mengembangkan menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu Lanjut Usia Terlantar dalam memecahkan persoalan sosial.

### **3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam mencapai Kinerja Dinas Sosial dalam Menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan penghambat. Dari sisi faktor pendukung yaitu dilihat dari:

1. Sarana dan prasarana yang memadai;
2. Tim monitoring yang siap untuk pelayanan dan pengaduan Lanjut Usia Terlantar.

Dari sisi faktor penghambat yaitu dilihat dari:

1. Masih banyak Lanjut Usia Terlantar belum terdata ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Penempatan pegawai khusus bidang sosial belum sesuai dengan kualifikasi;
3. Kuota Panti Sosial Terbatas;
4. Kurangnya kesadaran keluarga untuk mengurus Lanjut Usia Terlantar.

### **3.4. Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi faktor-faktor penghambat untuk menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi, yaitu:

1. Membantu mengurus Lanjut Usia Terlantar untuk mendapatkan identitas diri;
2. Melakukan pengajuan permohonan pengkualifikasian pegawai sesuai kompetensi pada bidang sosial dengan kebutuhan;

### 3. Melakukan penambahan kuota Panti Sosial.

#### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani, Mu'min Ma'ruf, Gusti Ayu Ambarawati pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul "Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sukabumi Provinsi Jawa Barat". Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan garis kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar Rp.26.777 di tahun 2015 dari Rp.395.131 per kapita per bulan menjadi Rp.421.908 per kapita per bulan dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow pada tahun 2021 yang berjudul "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado)". Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengambil kebijakan yang tujuannya adalah untuk menanggulangi masalah anak terlantar di Kota Manado beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan angka bahkan membawa Kota Manado ke angka 0 untuk kasus Anak Terlantar.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rika Nuriana pada tahun 2017 yang berjudul "Pemberdayaan "PMKS" (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya". Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan Tahapan-tahapan pemberdayaan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya baru dilakukan pada tahap penyadaran dan tahap pengkapasitasan saja, karena dalam tahap pemberdayaan lansia belum dikatakan berdaya sepenuhnya. Pemberdayaan lansia masih rendah, karena lansia tidak memiliki potensi, tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan, tidak dapat memahami cara membuat keterampilan secara mandiri, tidak dapat menciptakan kreativitas ekonomi, dan tidak ada yang memberikan argumen.

Pembaharuan temuan penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yaitu berkaitan dengan Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi bukan hanya mengukur kinerja Dinas Sosial Kota Jambi tetapi juga mengukur penyelenggaraan kesejahteraan sosial kemudian peneliti mendapatkan temuan yang membedakan penelitian terdahulu yaitu terkait dengan Teori Agus Dwiyanto (2008:50) terdapat indikator yang belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan Pada sumber daya manusia bahwa Dinas Sosial Kota Jambi masih belum ada mengikuti diklat untuk penanganan Lanjut Usia Terlantar, pegawai yang penempatan pegawai belum sesuai dengan kualifikasi. Pada Sosialisasi, belum ada sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial terkait penanganan Lanjut Usia Terlantar. Selain itu, Peneliti mendapatkan temuan yang membedakan penelitian terdahulu yaitu terkait dengan Lanjut Usia Terlantar dalam Kesejahteraan Sosial yang belum sesuai dengan Teori Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006) dikarenakan masih banyak indikator Kesejahteraan Sosial yang belum terpenuhi.

#### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi sudah cukup baik. Peneliti menemukan faktor penghambat dalam program sembako ini dari sisi Masih banyak Lanjut Usia Terlantar belum terdata ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

Penempatan pegawai khusus bidang sosial belum sesuai dengan kualifikasi, Kuota Panti Sosial Terbatas, Kurangnya kesadaran keluarga untuk mengurus Lanjut Usia Terlantar.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan dengan hasil peneliti, dapat disimpulkan dari berbagai temuan yang telah diteliti oleh peneliti terhadap Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi , peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar dapat dikatakan cukup baik sesuai dengan Teori Kinerja menurut Agus Dwiyanto, namun masih terdapat beberapa indikator penunjang pelayanan dan penanganan yang belum terpenuhi. Pada sumber daya manusia bahwa Dinas Sosial Kota Jambi masih belum ada mengikuti diklat untuk penanganan Lanjut Usia Terlantar, pegawai yang penempatan pegawai belum sesuai dengan kualifikasi . Pada Sosialisasi, belum ada sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial terkait penanganan Lanjut Usia Terlantar.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi dapat dikatakan belum sesuai dengan Teori Kesejahteraan Sosial menurut Segal dan Brzuzy dikarenakan masih banyak indikator Kesejahteraan Sosial yang belum terpenuhi. Misalnya, indikator kondisi kesehatan bahwa kondisi kesehatan masyarakat yang dialami lansia terlantar ini mengalami penurunan kondisi fisik serta mengidap penyakit bawaan maupun tidak. Pada indikator tingkat pendapatan bahwa Lanjut Usia Terlantar ini tidak memiliki pendapatan dan hanya mengharap belas kasihan dari warga setempat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Indikator tingkat kebahagiaan Lanjut Usia Terlantar memprihatinkan dikarenakan tekanan dan menjadi beban dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi yang membuat mereka merasa tidak bahagia sehingga Lanjut Usia Terlantar ini harus merasakan beban di sisa-sisa akhir kehidupan mereka. tidak semua Lanjut Usia Terlantar memiliki kesempatan kerja yang sama. Misalkan apakah Lanjut Usia Terlantar tersebut masih dalam kategori Lanjut Usia Potensial bukan lanjut Usia Tidak Potensial, sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari atau tidak.
3. Faktor Pendukung dalam Kinerja Dinas Sosial dalam Menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi, yaitu:  
a) Sarana dan prasarana yang memadai; dan b) Tim Monitoring yang siap untuk pelayanan dan pengaduan Lanjut Usia Terlantar. Faktor Penghambat dalam Kinerja Dinas Sosial dalam Menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi, yaitu : a) Masih banyak Lanjut Usia Terlantar belum terdata ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); b) Penempatan Pegawai Khusus Bidang Sosial belum sesuai dengan Kualifikasi; c) Kuota Panti Sosial Terbatas; dan d) Kurangnya kesadaran keluarga untuk mengurus Lanjut Usia Terlantar.
4. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi untuk Menurunkan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi, yaitu : a) Membantu Mengurus Lanjut Usia Terlantar Untuk Mendapatkan Identitas Diri; b) Melakukan Pengajuan Permohonan Pengkualifikasian Pegawai sesuai

Kompetensi pada Bidang Sosial dengan Kebutuhan; c) Melakukan Penambahan Kuota Panti Sosial.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 14 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta membuat solusi akan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, dikarenakan waktu penelitian yang singkat peneliti keterbatasan untuk menjangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan terkait Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Sosial dalam menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi. Hal ini diperuntukkan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi Provinsi Jambi

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Pemerintah Kota Jambi Provinsi Jambi khususnya Dinas Sosial Kota Jambi serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. Dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*,

Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Handayani, N., & Ambarawati, G. A. (2019). *PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 1-12.

Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). GOVERNANCE*, 1(2).

Nuriana, R. (2017). *Pemberdayaan "PMKS" (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*.

Bandung: Alfabeta.

Suud, M. (2006). *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

